

**KEBIJAKAN PIMPINAN TENTANG AKSESIBILITAS MAHASISWA
DISABILITAS FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Fahmi Fahrizal Assegaf

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri
Surabaya

Fahmi.17040564087@mhs.unesa.ac.id

Farid pribadi

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri
Surabaya

faridpribadi@unesa.ac.id

Abstrak

Disabilitas merupakan kondisi cacat fisik seseorang sehingga mengalami keterbatasan dalam melakukan berbagai aktifitas. Penyandang disabilitas sering mendapatkan diskriminasi secara verbal dan nonverbal karena kondisi cacat mereka. Sebagai penyandang disabilitas mereka memiliki hak, salah satu hak dengan mendapatkan Pendidikan dari jenjang dasar sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Hak – hak penyandang disabilitas telah diatur dalam undang – undang dan peraturan pemerintah untuk dipenuhi pemerintahan pusat hingga daerah sebagai pelayanan kepada semua masyarakat tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Unesa sebagai instansi Pendidikan memiliki peran penting dalam menerima mahasiswa disabilitas untuk mendapatkan Pendidikan jenjang perguruan tinggi, Unesa juga merupakan kampus yang sering menjadi rujukan penyandang disabilitas untuk melanjutkan kuliah. Untuk mendukung keperluan mahasiswa disabilitas di Unesa, pimpinan mengeluarkan kebijakan – kebijakan untuk mendukung proses perkuliahan mahasiswa disabilitas. Tetapi dalam praktik dan kenyataan dilapngan kebijakan tersebut mengalami beberapa disfungsi atau *nonfungsi*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dengan teori disfungsi milik Robert k. merton melihat fenomena kebijakan dengan kenyataan sebagai kajian dalam penelitian ini. subjek penelitian merupakan mahasiswa fakultas Teknik Unesa yang ditentukan dengan *internal sampling* dalam penentuan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi pendukung lainnya. Penelitian menggunakan analisis data milik miles dan Huberman dengan melakukan 3 tahapan yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Temuan data dalam penelitian menemukan disfungsi pernyataan dan kebijakan dengan pemenuhan kebutuhan mahasiswa disabilitas yang sebenarnya hak mereka sudah diatur dalam undang – undang dan perturan pemerintah tetapi mengalami disfungsi manifes dan laten saat peneliti melakukan penelitian.

Kata Kunci : Mahasiswa Disabilitas, Kebijakan, Disfungsi

Abstract

Disability is a condition of a person's physical disability so that they experience limitations in carrying out various activities. Persons with disabilities are often discriminated against verbally and non-verbally because of their disability. As persons with disabilities, they have rights, one of which is to get education from basic to tertiary levels. The rights of persons with disabilities have been regulated in laws and government regulations to be fulfilled by the central to regional governments as a service to all people without exception for persons with disabilities. Unesa as an educational institution has an important role in accepting students with disabilities to get higher education, Unesa is also a campus that often becomes a reference for people with disabilities to continue their studies. To support the needs of students with disabilities at Unesa, the leadership issues policies to support the lecture process for students with disabilities. However, in practice and the reality on the ground, the policy suffers from several dysfunctions or non-functions. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. With Robert k's dysfunction theory. Merton sees the phenomenon of policy with reality as a study in this research. the research subject is a student of the Unesa Engineering faculty who is determined by internal sampling in determining the research subject. Data collection techniques by conducting observations, in-depth interviews, and other supporting documentation. The research uses Miles and Huberman's data analysis by performing 3 stages, namely reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The findings of the data in the study found that the dysfunction of statements and policies by fulfilling the needs of students with disabilities whose rights were actually regulated in laws and government regulations but experienced manifest and latent dysfunction when researchers conducted research.

Keywords: Students with Disabilities, Policy, Dysfunction



PENDAHULUAN

Keadaan seseorang cacat seringkali menjadi salah satu penyebab keadaan orang tersebut dianggap lemah, mereka dipandang sebagai manusia rendah karena tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna. Diskriminasi ini yang menjadikan orang cacat ingin melakukan perubahan, perubahan yang mereka lakukan dengan mendapatkan pendidikan yang layak sampai dengan perguruan tinggi. Dengan pendidikan tinggi setidaknya dapat sedikit mengangkat derajat seseorang, prinsip ini masih dipegang oleh kebanyakan orang. Oleh sebab itu orang yang memiliki pendidikan baik dari orang normal ataupun cacat berfikir bahwa pendidikan itu penting bagi mereka sebagai identitas mereka di kehidupan masyarakat.

Setiap manusia memiliki hak asasi untuk memperoleh Pendidikan tanpa terkecuali penyandang disabilitas; selain itu Pendidikan seyogyanya 'wajib dan bebas biaya bagi semua' dengan mengetahui Pendidikan yang Non – diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangan, hak anak untuk dihargai pendapatnya; oleh karena itu Pendidikan inklusif sendiri merupakan suatu strategi promosi Pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsive

terhadap beragam kebutuhan actual bagi masyarakat. Dengan demikian, Pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas. Satu tujuan utama inklusi adalah mendidik anak yang berkebutuhan khusus untuk didukung sesuai kebutuhannya. Maka dari itu Pendidikan untuk semua sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak dalam memperoleh Pendidikan bagi kaum disabilitas.(Wahyudi 2018)

Berdasarkan undang – undang nomer 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 4 bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas fisik
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik

Kemudian itu unesa yang menjadi rujukan kampus ramah disabilitas, melakukan beberapa kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam aspek akademik maupun non bagi penyandang disabilitas agar mendapatkan pendidikan yang layak. Diketahui unesa memiliki jurusan PLB atau pendidikan laur biasa, jurusan PLB diharapkan dapat memenuhi Pendidikan tinggi penyandang disabilitas lebih maksimal dan sesuai undang – undang, aturan dan permendikbud

dalam Pendidikan tinggi penyandang disabilitas.

Jumlah mahasiswa disabilitas unesa kurang lebih 33 mahasiswa yang terbagi dalam 7 fakultas di unesa, fakultas ilmu sosial dan hukum; fakultas ekonomi dan bisnis; fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam; fakultas Teknik; fakultas ilmu Pendidikan, fakultas Bahasa dan seni, dan fakultas ilmu keolahragaan. Unesa menyampaikan sebagai kampus ramah disabilitas di Indonesia, karena hal ini pimpinan kampus memiliki kebijakan yang digunakan sebagai kampus ramah disabilitas yang ada. Pada tahun 2019 penyandang disabilitas di Unesa bisa merasakan fasilitas atau kemudahan aksesibilitas dalam kegiatan perkuliahan. Setelah pergantian rektor pada tahun 2018, rektor sebagai pimpinan tertinggi kampus menjelaskan 3 hal dalam pengembangan kaum disabilitas/inklusif dalam tujuan untuk ramah disabilitas yaitu ada :

- a. Kebijakan pimpinan yang afirmatif
- b. Praktik layanan untuk semua yang berbasas kesetaraan, pemenuhan hak, akomodatif, aksesibel dan tidak diskriminatif
- c. Budaya lingkungan inklusif dan ramah untuk semua

Dalam pengembangan untuk kaum disabilitas/inklusif didalam kampus, pimpinan kampus memiliki tujuan untuk mengembangkan unesa dalam ramah diabilitas (Baca : majalah unesa nomer 129 tahun XX – mei 2019, halaman 23) (Ningrum n.d.).

Kebijakan tersebut harus didampingi dengan infrastruktur memadai mahasiswa yang istimewa yang kemudian dalam kutipan di salah satu berita online mengatakan bahwa unesa siap melakukan cara dalam mempermudah mahasiswa disabilitas dengan baik, dalam hal ini kebijakan atau suatu tujuan untuk ramah disabilitas yang dijelaskan majalah unesa merupakan pernyataan rektor unesa untuk menyambut ramah disabilitas yaitu memiliki beberapa point penting yang bisa diketahui seperti (stella azasya n.d.) :

1. Siap bimbing mahasiswa disabilitas sampai lulus
2. Infrastruktur untuk difabel siap 99 persen
3. Mahasiswa difabel digabung dengan kelas reguler

Kebijakan tersebut diharapkan membantu kampus unesa sebagai kampus ramah disabilitas dengan memberikan pelayanan publik dan lingkungan yang nyaman sesuai kebutuhan mahasiswa

disabilitas. Setelah kebijakan untuk mahasiswa disabilitas tersebut dikeluarkan, tindak lanjut dilakukan oleh seluruh pimpinan yang berada pada Fakultas di lingkungan Unesa. Dalam menyikapi pernyataan dan kebijakan rektor unesa, pemimpin tiap fakultas atau disebut dengan dekan memiliki berbagai metode atau cara dalam aplikasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas di tiap fakultas. Perlu diketahui ada beberapa masalah yang dihadapi mahasiswa disabilitas unesa seperti pernyataan dan kebijakan bagi mahasiswa disabilitas tidak didukung dengan aksesibilitas di lingkungan fakultas bahkan jurusan yang memadai atau sesuai standard untuk penyandang disabilitas. Selain itu, lingkungan kampus dan kelas yang kurang memadai bagi mahasiswa disabilitas dalam proses perkuliahan. Sehingga menimbulkan disfungsi antara kebijakan dan pernyataan oleh rektor unesa tentang ramah disabilitas dengan kenyataan di lapangan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif terjadi karena adanya paradigma dalam hal pandangan serta melihat secara realitas yang ada. Sehingga sifat penelitian sesuai dengan judul penelitian, dalam penelitian melihat fakta – fakta di lapangan

yang dialami narasumber tanpa dibuat – buat. Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif.(Nurdin and Hartati 2019). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif ini karena menggambarkan atau mendeskripsikan interaksi manusia sebagai individu maupun kelompok dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan dengan memberikan konteks spesifik, mendetail, dan mendalam; berfokus pada hubungan historis, fungsional, teleologis, dialektis; maka dari itu peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam, mendalam yang menggambarkan, situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data (Nurdin and Hartati 2019).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Internal Sampling* karena berkaitan dengan pembatasan jumlah dan jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian (Nurdin and Hartati 2019). Subjek penelitian merupakan mahasiswa disabilitas fakultas Teknik yang sedang masa studi dan menjadi lokasi tempat penelitian berlangsung. Alasan peneliti memilih fakultas Teknik karena dalam masa studi di kampus unesa fakultas Teknik seringkali mendapatkan berbagai sorotan sebagai fakultas yang menerima mahasiswa disabilitas dengan jumlah yang lumayan banyak, selain itu juga fakultas yang sering

melakukan praktek dilapangan dan dengan tingkat kesulitan mahasiswa yang lulus. Dalam fakultas Teknik memiliki 11 mahasiswa disabilitas yang terbagi dalam berbagai jurusan dan prodi dengan keterbatasan mereka.

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui dua sumber, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui Teknik pengamatan berpartipasi dan wawancara mendalam dengan informan mengenai kesesuaian fakta dilapangan dengan kebijakan yang diketahui. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dalam bentuk buku referensi, undang – undang, peraturan pemerintah, artikel yang dipublikasikan melalui jurnal, monografi dan data statistik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis data dengan model miles dan Huberman. Dalam analisis data miles dan Huberman penelitian kualitatif dilakukan dengan 3 cara yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data merupakan pemilahan data penting dan tidak penting dari data yang dikumpulkan. Penyajian data memiliki pengertian menyajikan informasi secara tersusun. Dan kesimpulan data merupakan tafsiran atau

interpretasi terhadap data yang disajikan (Ismail Nurdin 2004).

KAJIAN PUSTAKA

A. Mahasiswa Disabilitas

Dalam penjelasan disabilitas ini merujuk pada buku sosiologi disabilitas (Wahyudi 2018) menjelaskan tentang disabilitas yang dilihat dari aspek sosiologi menjelaskan beberapa isi mengenai disabilitas, kemudian peneliti menmabil sebagai salah satu referensi untuk mengetahui pengertian dan penjelasan tentang disabilitas. Hakikat disabilitas menurut beberapa sumber membuat kita seringkali bingung, karena istilah cacat (*disabled*), ketidakmampuan (*handicoped*), dan kerusakan/kelemahan (*impairment*). WHO mengusulkan 3 definisi mendasar :

- a) *Impairment* (kerusakan/kelemahan) adalah ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, fisiologi, atau anatomis
- b) *Disability* (cacat) adalah segala keterbatasan atau ketiadaan kemampuan (sebagai akibat kerusakan tadi) untuk melakukan aktivitas dengan cara atau dalam batas – batas yang dianggap ‘normal’ bagi manusia.
- c) *Handicap* (ketidakmampuan) adalah keadaan yang merugikan bagi seseorang,

sebagai akibat dari ‘kerusakan/kelemahan’ atau kecacatan yang membatasi atau mencegah pemenuhan peranan yang normal (tergantung usia, jenis kelamin, serta factor social budaya)

Para penyandang cacat maupun berbagai organisasi professional masih terus berdebat tentang peristilahan ini. Kemudian gerakan penyandang cacat secara tegas menolak ketiga definisi yang disebutkan diatas dan lebih menerima menggunakan dua konsep yang berkaitan dengan model social.

(a) *Impairment* (kerusakan/kelemahan) artinya ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya tertentu.

(b) *Disability/handicap* (cacat/ketidakmampuan): adalah kerugian/keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat factor – factor social yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang ‘kerusakan/kelamahan’ tertentu dan karenanya mengeluarkan orang – orang itu dari arus aktifitas social.

Istilah penyandang cacat yang terkesan negative dan diskriminatif, dalam percaturan ilmu social lahir istilah **diffable**.

sendiri berarti berarti manusia yang memiliki kemampuan berbeda.

Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas sudah diatur dalam undang – undang yang telah berlaku hingga sekarang, pemenuhan dalam bentuk advokasi sampai dengan pendampingan bagi anak ABK sesuai dengan kebutuh mereka dijelaskan pada Undang – Undang Nomer 8 Tahun 2016 Pasal 5 beberapa menjelaskan tentang :

- (a) Advokasi oleh Pusat Layanan Difabel sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap mahasiswa penyandang disabilitas dikampus mauapun tempat umum
- (b) Program pendidikan untuk mendampingi kaum difabel sudah diatur dan dikelola sesuai dengan kebutuhan
- (c) Mahasiswa difabel bebas untuk berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui berbagai sarana yang disediakan Pusat Layanan Difabel
- (d) Prinsip non diskriminasi, penghormatan atas perbedaan mahasiswa penyandang disabilitas, penghormatan atas martabat yang melekat pada mahasiswa penyandang disabilitas, partisipasi dalam proses perkuliahan dan aksesibilitas, belum sepenuhnya

dipenuhi universitas melalui Pusat Layanan Difabel. (Rumateray 2016)

Undang – undang tersebut didukung permendikbud sebagai penguat hak penyandang disabilitas dalam menerima Pendidikan, pemenuhan kebutuhan pendidikan diatur pemerintah pusat yang diberikan kepada sekolah/perguruan tinggi. diatur dalam permendikbud nomer 70 tahun 2009 menjelaskan pendidikan disabilitas bahwa (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 2009) :

- a. Pemerintahan kabupaten/kota sampai pemerintahan pusat wajib meningkatkan kompetensi dibidang khusus bagi pendidik dan tenaga pendidik pada satuan penyelenggara pendidikan inklusif
- b. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan professional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

B. Kebijakan

Kebijakan yang dikeluarkan diharapkan mendukung kampus sebagai kampus ramah disabilitas, selain undang – undang; peraturan pemerintah samapi permendikbud sebagai dasar dalam menentukan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas. Unesa

memiliki kebijakan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas sebagai kampus ramah disabilitas. Kebijakan tersebut berbentuk aksesibilitas yang terbagi menjadi sarana dan prasarana mahasiswa disabilitas, kebijakan dibuat agar mempermudah tujuan kampus ramah disabilitas.

C. Aksesibilitas

Aksesibilitas terbentuk dari kebijakan kampus dalam upaya ramah disabilitas, difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mahasiswa disabilitas. Aksesibilitas terbagi menjadi sarana dan prasarana mahasiswa disabilitas, kebijakan kampus tentang disabilitas berbentuk aksesibilitas unesa dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas untuk mengetahui terjadinya disfungsi atau *nonfungsi* dengan kenyataan dilapangan. Berikut penjelasan aksesibilitas sarana dan prasarana :

1. Sarana

Sarana dalam penjelasan kamus besar bahasa indonesia (KBBI) ialah segala sesuatu yang bisa dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, bisa juga dalam bentuk media. Maka dalam hal ini kebijakan tentang aksesibilitas sarana untuk mengetahui kesesuaian dengan pernyataan dalam menunjang sarana mahasiswa disabilitas dengan melihat kebijakan seperti media pembelajaran

bagi mahasiswa disabilitas, lingkungan kampus yang ramah maupun tenaga pendukung lainnya.

2. Prasarana

Prasarana Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang sebagai penunjang utama dalam terselenggaranya suatu proses seperti usaha, pembangunan, proyek, dan lain sebagainya. Dalam hal ini prasarana yang difokuskan pada fasilitas kampus, pembangunan yang dikatakan dalam ramah disabilitas, kelas, perpustakaan, serta fasilitas penunjang dalam hal kemudahan aksesibilitas mahasiswa disabilitas.

Teori disfungsi atau *nonfungsi* Robert K. Merton

Pemikiran penting Robert k Merton pada struktur sosial dalam analisis sosiologis. Landasan berfikir Robert k Merton tentang birokrasi sebagai struktur sosial yang terorganisasi secara rasional dan formal. Birokrasi sebagai pemegang dari struktur sosial yang ada di masyarakat, status-status dalam birokrasi tersusun ke dalam susunan yang hirarkis, otoritas tertinggi pada jabatan dimiliki oleh birokrasi, sesuai dengan kesepakatan atau aturan dari birokrasi yang ada. Birokrasi kampus sebagai pemegang struktur sosial dalam kampus memiliki peran

penting terhadap proses perkuliahan dikampus dengan memberikan tekanan kepada setiap individu atau kelompok agar disiplin sesuai aturan untuk mencapai tujuan. Kampus sebagai sebagai instansi pendidikan yang memegang kendali terhadap struktur sosial, struktur sosial tersebut tentang struktural fungsional birokrasi struktural fungsional milik Robert K. Merton melihat keteraturan dan mengabaikan konflik yang terjadi di lingkungan kampus.

Dalam struktural sosial dari sebuah struktur perkuliahan, akan muncul kelompok sosial dengan sendirinya. Kelompok sosial terbentuk secara alami sebagai bentuk identitas dari setiap individu yang memiliki kepentingan atau tujuan tertentu diperkuliahan, kelompok sosial didefinisikan kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok sosial kampus diciptakan oleh warga kampus, kelompok sosial dapat berpengaruh terhadap anggota mereka. Menurut Robert k. merton kelompok sosial merupakan sekumpulan orang atau individu yang berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan (Ginintasi 2012). Dalam penelitian ini peneliti memasukkan kelompok sosial dengan perspektif Robert k. merton sebagai salah satu pengelompokkan bagi subjek penelitian untuk mengelompokkan

kelompok sosial mahasiswa sesuai dengan jenis mereka dengan perspektif kelompok sosial Robert k. merton.

Dengan melihat sudut pandang struktural fungsional kebijakan unesa sebagai kampus ramah disabilitas dapat diketahui, implementasi kebijakan dalam perspektif Robert K. Merton akan menimbulkan konsekuensi. Konsekuensi akibat tidak relevan pernyataan serta kebijakan dengan kenyataan akan menimbulkan konsekuensi disfungsi atau nonfungsi, perbedaan letak geografis 2 kampus unesa menyebabkan sistem tidak dapat berjalan dalam implementasi yang diinginkan oleh kampus atau birokrasi, kebijakan aksesibilitas pemerintah sesuai dengan aturan sehingga menimbulkan disfungsi atau nonfungsi. Dalam keteraturan struktur sosial yang dikemukakan Robert k. merton selain menjelaskan keteraturan yang terstruktur juga menjelaskan tentang terjadinya suatu disfungsi yang belum berjalan sesuai keinginan struktur sosial atau aturan birokrasi untuk terciptanya kehidupan yang terstruktur sesuai harapan. Karena tidak berjalan dan belum sesuai dengan keinginan sehingga mengalami disfungsi atau non fungsi pernyataan dan kebijakan tersebut dengan kenyataan.

Pemikiran Robert K. Merton tentang disfungsi dibagi menjadi 2 yaitu disfungsi manifes dan laten. Manifes dalam penjelasannya merupakan pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau kelompok, sedangkan laten merupakan pernyataan yang dimaksudkan secara tersembunyi, terpendam, atau tidak terlihat tetapi memiliki maksud. Disfungsi manifes dan laten dalam penelitian dibagi untuk mempermudah dalam temuan data, analisis data, dan mengkategorikan. Kategori disfungsi manifes dalam penelitian terkait dengan bentuk jadi atau sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan. Sedangkan untuk disfungsi laten masuk dalam kategori yang tidak terlihat atau dirasakan tetapi memiliki dampak bagi suatu kelompok. Struktur sosial dalam proses perkuliahan akan terus berjalan apapun keadaannya walaupun mengalami disfungsi atau nonfungsi kebijakan, disfungsi Robert k. merton memiliki terbagi menjadi 4 yaitu :

a. *Conformity* (Kesesuaian)

Pemikiran robert k. merton tentang level disfungsi *conformity* atau diartikan dengan kesesuaian. Kesesuaian merupakan realitas sosial sesuai dengan struktur, Lembaga – Lembaga dapat berperan dalam memelihara bagian – bagian sistem sosial agar berjalan dengan baik. Realitas atau fakta

merupakan kesesuaian keadaan atau kondisi dilapangan dengan kebijakan dan pernyataan yang diberikan, fakta atau realitas dilapangan menjadi tolok ukur bagi birokrasi kampus atau evaluasi secara keseluruhan.

Comformity melihat realita dilapangan dengan kebijakan yang mengalami disfungsi kebijakan karena belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya antara pernyataan dengan kenyataan, struktur sosial masih berjalan dengan baik. Kebijakan yang diharapkan memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi, pemenuhan kebutuhan bagi penyandang disabilitas terfokus terhadap aksesibilitas mahasiswa dalam perkuliahan, KBBI menjelaskan bahwa sesuatu atau hal yang dijadikan akses untuk mencapai tujuan tertentu adalah aksesibilitas (Aksesibilitas 2016).

b. Innovation (Inovasi)

Level disfungsi Robert selanjutnya berkaitan dengan *innovation*, kebijakan yang diharapkan berjalan semestinya agar struktur sosial terkendali dengan harapan sebuah kebijakan tersebut dikeluarkan tetapi dalam prakteknya mengalami sebuah disfungsi atau *nonfungsi*. Inovasi yang dilakukan pelaku kebijakan memang sejalan dengan tujuan yang diharapkan, tetapi Tindakan yang dilakukan oleh pelaku kebijakan tidak sesuai

atau sedikit menyimpang dengan keinginan birokrasi.

Inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa disabilitas ataupun mahasiswa regular lain karena melihat sebuah kebijakan kampus dikeluarkan belum terpenuhi secara keseluruhan, sehingga inovasi dalam mencapai kebijakan yang diharapkan kampus terlaksana tetapi menyimpang terhadap suatu struktur sosial

c. Ritualism

Salah satu level disfungsi Robert terkait dengan *ritualism*, *ritualism* merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan masyarakat tetapi perilaku ini masih berpedoman pada norma yang telah ditetapkan. Dalam proses perkuliahan bagi mahasiswa disabilitas saat berlangsung atau berjalan sebelum dan saat pandemik memiliki beberapa sorotan. Sorotan berkaitan dengan pernyataan dan kebijakan dalam kehidupan kampus bagi seluruh mahasiswa, hal yang belum sesuai dengan tujuan kebijakan dengan kenyataan berkaitan dengan perilaku. Mahasiswa disabilitas yang tersorot sebagai mahasiswa dalam kebijakan kampus ramah disabilitas berpendapat bahwa perilaku mahasiswa disabilitas lainnya tidak sesuai dengan tujuan kebijakan yang kampus harapkan atau melenceng dalam menciptakan lingkungan ramah disabilitas bagi mahasiswa

disabilitas sendiri, kebijakan dikeluarkan agar mahasiswa disabilitas saling mendukung atau memberikan arahan dalam kehidupan perkuliahan dengan keterbatasan mereka. Level disfungsi ritualism terlihat dari kebijakan untuk menciptakan lingkungan nyaman bagi semua mahasiswa belum sesuai dengan proses yang diharapkan sehingga terjadi keterpaksaan terlaksananya kebijakan sehingga terjadi disfungsi, budaya yang melenceng tanpa mengesampingkan kebijakan tersebut tetapi struktur sosial tidak berjalan dengan semestinya.

d. *Retreatism*

Level disfungsi terakhir menurut Robert k. merton terkait dengan *retreatism* atau *retreatisme*, menurut KKBI *retreatisme* merupakan proses yang terjadi apabila nilai – nilai yang berlaku tidak dapat dicapai melalui cara yang melembaga, tetapi warga masyarakat mempunyai kepercayaan yang mendalam sehingga mereka tidak mau menyimpang dari kaidah yang telah melembaga. Dalam proses perkuliahan mahasiswa disabilitas mengalami kesulitan, seringkali dipandang sebelah mata oleh beberapa mahasiswa sampai dianggap tidak bisa melakukan apapun. Karena perilaku tersebut mahasiswa disabilitas bersikap *retreatisme* terhadap lingkungan, mereka lebih mengasingkan diri untuk membatasi

mobilitas mereka. Selain itu, pendampingan yang kurang dari kampus menjadi penyebab mereka tidak diperhatikan atau didampingi. Oleh sebab itu beberapa mahasiswa disabilitas lebih tertutup bahkan dengan teman sekelas mereka sendiri, mereka lebih fokus menyelesaikan studi dengan cepat dan mengesampingkan kehidupan sosial kampus. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan untuk menjadikan lingkungan yang nyaman bagi kaum disabilitas, mereka beranggapan juga bisa melakukannya sendiri daripada harus menunggu orang lain.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Temuan data didapatkan sebagai bahan kajian penelitian yang dilakukan melalui tahapan observasi penelitian; temuan data melalui wawancara mendalam, aturan pemerintah, undang – undang, media cetak online/offline; dan dilakukan analisis data sebagai tahapan akhir penelitian untuk menemukan data yang diinginkan. Hasil atau temuan data dilapangan direduksi atau kodifikasi data sesuai dengan sumber informasi yang ditemukan, reduksi data dibedakan menjadi :

1) Observasi

Temuan data	Pokok bahasan
-------------	---------------

Pengamatan peneliti terhadap lingkungan	Pengamatan dilakukan untuk menemukan fakta dilapangan tentang fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan mahasiswa disabilitas dikampus
---	--

	Selain pernyataan tersebut, pemenuhan kebutuhan mahasiswa disabilitas dikemukakan dalam bentuk kebijakan seperti : a) Siap bimbing mahasiswa disabilitas sampai lulus b) Infrastruktur untuk difabel siap 99 persen c) Mahasiswa difabel digabung dengan kelas reguler
--	---

2) Majalah unesa

Temuan data	Pokok bahasan
Mengetahui Pernyataan dan kebijakan ramah disabilitas dari kampus unesa	Pernyataan kampus dalam pemenuhan kebutuhan mahasiswa disabilitas dalam bentuk dapat merasakan fasilitas atau kemudahan aksesibilitas dalam kegiatan perkuliahan. Aksesibilitas dalam pernyataan tentang : a) Kebijakan pimpinan yang afirmatif b) Layanan yang setara antara mahasiswa disabilitas dengan reguler c) Budaya lingkungan yang inklusif

3) Undang – undang nomer 8 tahun 2016

Temuan data	Pokok bahasan
Mengetahui hak – hak penyandang disabilitas yang diatur oleh undang – undang	Undang – undang ini merupakan dasar atau landasan dalam pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi atau terpenuhi : a) Ketentuan umum yang mencakup keseluruhan hak secara umum bagi

	<p>semua penyandang disabilitas</p> <p>b) Hak penyandang disabilitas yang mereka terima</p> <p>c) Pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai sektor publik</p>
--	--

	<p>peserta didik disabilitas dalam proses Pendidikan mereka</p> <p>b) Terbentuknya atau dibentuknya unit layanan disabilitas yang wajib dipenuhi oleh instansi Pendidikan dalam pendampingan peserta didik dalam proses Pendidikan disabilitas berbagai jenjang.</p>
--	--

4) Peraturan pemerintah nomer 13 tahun 2020

Temuan data	Pokok Bahasan
Peraturan pemerintah tentang hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan Pendidikan dalam semua jenjang	<p>Dalam peraturan pemerintah ditemukan hak – hak penyandang disabilitas yang wajib terpenuhi dan disediakan instansi pendidikan bagi peserta didik :</p> <p>a) Penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik wajib dipenuhi oleh instansi Pendidikan untuk mempermudah</p>

5) Subjek penelitian

Temuan data	Pokok Bahasan
Mengetahui fakta dilapangan mahasiswa disabilitas dalam proses perkuliahan	<p>Menemukan fakta yang hanya ditemukan dilapangan dengan kenyataan yang dirasakan :</p> <p>a) Mengetahui fakta terhadap pernyataan dan kebijakan kampus ramah disabilitas terhadap pemenuhan mahasiswa disabilitas yang</p>

	<p>mengalami disfungsi dengan kenyataan</p> <p>b) Memberikan pernyataan tentang pemenuhan kebutuhan mahasiswa disabilitas dalam menempuh Pendidikan diatur dalam undang – undang dan peraturan pemerintah yang wajib dipenuhi dan terpenuhi oleh instansi pendidikan tetapi belum berjalan semestinya atau mengalami disfungsi dalam pemenuhan kebutuhan mahasiswa disabilitas dikampus</p>
--	---

Realitas aksesibilitas fakta pemenuhan hak disabilitas (*conformity*)

Conformity atau Realitas sosial pemikiran Robert K. Merton menjelaskan bahwa realitas sosial harus sesuai dengan struktur, kemudian Lembaga – Lembaga

dapat berperan dalam memelihara bagian – bagian sistem sosial agar berjalan dengan baik. Pemenuhan kebutuhan bagi penyandang disabilitas selanjutnya tentang aksesibilitas, KBBI menjelaskan bahwa sesuatu atau hal yang dijadikan akses untuk mencapai tujuan tertentu adalah aksesibilitas (Aksesibilitas2016). Aksesibilitas mahasiswa disabilitas dalam perkuliahan dengan realitas atau fakta dilapangan untuk pemenuhan hak mahasiswa disabilitas terjadi disfungsi dengan kebijakan yang dikemukakan, disfungsi tersebut terbagi menjadi pokok bahasan sebagai berikut:

a. **Lingkungan Ramah Disabilitas**

Dalam menciptakan lingkungan ramah disabilitas, kampus memeberikan pernyataan bahwa unesa menciptakan lingkungan ramah untuk kaum inklusif. Dalam kenyataan ramah disabilitas masih belum dirasakan semestinya. Lingkungan kampus yang sering memandang mahasiswa disabilitas aneh, tidak dapat melakukan sesuatu karena bentuk tubuh yang tidak normal. Lingkungan yang seringkali menjatuhkan mental mahasiswa disabilitas dalam berkuliah di kampus. Selain fasilitas dalam bentuk nyata yang terlihat, pembekalan atau penyampaian dengan eksistensi mahasiswa disabilitas

sebagai mahasiswa kepada mahasiswa lain atau warga kampus diperlukan untuk menciptakan lingkungan ramah disabilitas

b. Pendampingan kampus dengan membentuk unit kampus

Pemberian pendamping dalam mendampingi mahasiswa disabilitas untuk mempermudah perkuliahan mereka telah diatur dalam undang – undang dan peraturan pemerintah. Pembentukan pendamping atau unit yang diketahui dengan nama PSLD menjadi bukti kampus telah memfasilitasi mahasiswa disabilitas dengan selayaknya. Dalam kasus yang dirasakan mahasiswa disabilitas fakultas Teknik, pemberian pendamping dengan sebutan PSLD masih belum dirasakan pendampingan untuk mahasiswa disabilitas, pendamping mahasiswa disabilitas seringkali mendahulukan keperluan kampus utama. Perbedaan lokasi dengan pemenuhan kebutuhan dalam pemberian pendamping menjadi hal disfungsi kebijakan yang seharusnya terpenuhi sesuai dengan aturan tetapi terkendala lokasi dan tenaga pendamping. Untuk memenuhi keperluan pendampingan,

c. Fasilitas kampus

Pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa disabilitas berkaitan dengan fasilitas kampus yang sering tersorot karena terlihat oleh semua warga kampus. Kebutuhan mahasiswa disabilitas dalam bentuk fasilitas kampus sesuai standar merupakan hal wajib dipenuhi oleh kampus sebagai kampus ramah disabilitas, pemenuhan fasilitas kampus terbagi menjadi 2 yaitu sarana dan prasarana. Sarana merupakan alat atau benda yang dapat bergerak untuk mendukung kebutuhan mahasiswa disabilitas seperti kursi roda, alat bantu jalan, tongkat, lift, *escalator*, dsb. Prasarana merupakan segala sesuatu penunjang utama dengan contoh lahan parker khusus disabilitas, penunjuk lokasi huruf braille, bidang miring, pintu khusus, dsb. Tetapi dalam pemenuhan fasilitas kampus ada standar wajib dipenuhi kampus dalam suatu Gedung untuk penyandang disabilitas, Gedung fakultas Teknik bahkan tidak memiliki beberapa standar wajib minimal Gedung ramah disabilitas sehingga mempersulit mahasiswa disabilitas mobilisasi dalam Gedung tersebut.

d. Fleksibilitas lingkungan kuliah dengan keadaan dilapangan

Selain pemenuhan kebutuhan aksesibilitas diatas dengan realitas dilapngan, fleksibilitas lingkungan kampus dengan kebutuhan dilapangan juga perlu diperhatikan. Fleksibilitas yang berkaitan dengan aksesibilitas tentang hal – hal pendukung perkuliahan seperti kemudahan informasi, pemberian materi yang mudah dipahami, pemberian tugas atau ulangan khusus mahasiswa disabilitas, dsb. Fleksibelitas dalam kasus tersebut bukan memberikan kemudahan atau keringanan tetapi menyesuaikan keadaan tanpa mempersulit mahasiswa disabilitas dalam mendapatkan fkelsibilitas tersebut. Perbedaan tentu terlihat karena kondisi mahasiswa disabilitas dengan mahasiswa regular berbeda secara fisik dan psikis, penyesuaian tentu perlu karena perbedaan tersebut. Dalam keadaan nyata atau *real* dilapangan, mahasiswa disabilitas mengalami kesulitan apabila aksesibilitas tersebut disama ratakan, karena pemahaman serta kemampuan untuk menerima informasi dengan keterbatasan mereka dalam melaksanakan menjadi sebab keterlaksanaan atau ketercapaian tugas, materi samapi informasi tersebut

terkendala berkaitan dengan aksesibilitas tersebut sering disfungsi, tidak menyesuaikan dengan keadaan mereka serta terkesan gegabah dalam memutuskan sehingga sedikit mempersulit saat perkuliahan berlangsung.

Ritualism

Salah satu level disfungsi sesuai dengan teori Robert terkait dengan *ritualism*, *ritualism* jika diartikan merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan masyarakat tetapi perilaku ini masih berpedoman pada norma yang telah ditetapkan. Dalam proses perkuliahan bagi mahasiswa disabilitas saat berlangsung atau berjalan selalu mendapatkan sorotan, sorotan sebagai mahasiswa dengan minoritas dalam mayoritas mahasiswa regular lain dengan diberikan kebijakan khusus mahasiswa disabilitas yang sering diperhatikan kampus. Kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrasi atau pimpinan dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya berjalan dengan baik saat ini. Mahasiswa disabilitas sebagai kelompok sosial mahasiswa mengatakan perilaku mereka beberapa kali tidak sesuai bahkan tidak bisa sesuai dengan tujuan kebijakan yang kampus berikan atau melenceng, tujuan kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus bertujuan agar

mahasiswa disabilitas yang telah masuk jenjang perkuliahan terlebih dahulu agar membantu kampus dalam mempermudah mahasiswa disabilitas lain untuk menjalani kehidupan kampus dalam proses pemenuhan hak mereka dalam mendapatkan Pendidikan tinggi.

Kehidupan kampus bagi mahasiswa selain dihabiskan dengan belajar, kuliah, tugas dan pulang juga ada pembejalaran lain terkait dengan lingkungan kampus, kehidupan politik kampus, sampai dengan hal - hal pengembangan kemampuan secara *softskill* dan *hardskill*. Bagi mahasiswa disabilitas yang memasuki kehidupan kampus terlebih dahulu seringkali kurang peka terhadap mahasiswa disabilitas yang baru memasuki perkuliahan serta cenderung mementingkan perkuliahan mereka sendiri. Kurang pekanya mereka terhadap lingkungan sekitar salah satunya karena kurang diperhatiannya mereka saat menjadi mahasiswa baru menjadi salah satu penyebab mereka kurang memberikan bimbingan kepada mahasiswa disabilitas lain. Selain itu juga pendampingan yang dilakukan oleh kampus yang diwakilkan oleh PSLD sering terjadi perbedaan karena beda wilayah serta perbedaan pemenuhan kebutuhan aksesibilitas yang dirasa terjadi ketimpangan, lingkungan kelas atau teman jurusan menjadi

salah satu penyebab sikap apatis yang timbul karena kurang perhatian atas hak – hak mereka dalam berkuliah di kampus. Selain itu juga pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa disabilitas yang lebih senior dan PSLD kampus sering memperhatikan mahasiswa sesuai dengan jurusan mereka masing – masing, ini memang sesuai dengan tujuan kampus untuk bisa memberdayakan mahasiswa disabilitas tetapi masih kurang peka terhadap jurusan lain, selain itu ada ego mahasiswa jurusan yang berbeda sehingga mereka kurang perhatian terhadap mahasiswa disabilitas lainnya yang bukan dari jurusan mereka. Maka hal itu pendampingan dan pemberdayaan mahasiswa disabilitas sering berjalan secara perlahan karena pemberdayaan atau pendampingan mahasiswa disabilitas diberikan secara lingkup mahasiswa disabilitas atau PSLD saja tanpa melibatkan mahasiswa lain. Karena hal tersebut, pendampingan terhadap mahasiswa disabilitas dapat dilakukan pemberian informasi bahwa dalam membantut mahasiswa disabilitas dilakukan dengan mudah dan menyenangkan, dapat dilakukan oleh mahasiswa lain atau warga kampus lain tanpa takut atau kesulitan dalam menolong mereka, selain itu juga ego atau sikap sebagai mahasiswa perlu diberi pembekalan agar

kepedulian sesama dapat dirasakan oleh mahasiswa atau warga kampus unesa.

Retreatism

Penjelasan disfungsi lainnya menurut menurut Robert k. merton terkait dengan *retreatism* atau *retreatisme*, menurut KKBI *retreatisme* merupakan proses yang terjadi apabila nilai – nilai yang berlaku tidak dapat dicapai melalui cara yang melembaga, tetapi warga masyarakat mempunyai kepercayaan yang mendalam sehingga mereka tidak mau menyimpang dari kaidah yang telah melembaga. Dalam proses perkuliahan bagi mahasiswa disabilitas akan mengalami kesulitan lebih dibandingkan dengan mahasiswa reguler lainnya, mereka sering dipandang sebelah mata oleh beberapa mahasiswa sampai dianggap tidak bisa melakukan apapun atau dikasihani. Seringkali perilaku ini yang menjadikan beberapa mahasiswa disabilitas bersikap *retreatisme* terhadap lingkungan, mereka lebih nyaman untuk mengasingkan diri membatasi mobilitas mereka. Dilihat dari latar belakangnya selain pandangan dari mahasiswa yang kurang berkenan, perhatian khusus bagi mahasiswa disabilitas dirasa kurang sehingga mereka bersikap tersebut. Maka dari itu beberapa mahasiswa memilih tertutup bahkan dengan teman sekelas mereka sendiri, mereka lebih berkeinginan

untuk menyelesaikan studi dengan cepat dan lebih mengesampingkan kehidupan sosial dalam kampus. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan kebijakan kampus dan pemerintah menjadikan lingkungan yang nyaman bagi kaum disabilitas untuk perkembangan mahasiswa disabilitas, kurang perhatian dan pandangan kurang menyenangkan dari mahasiswa lainnya menyebabkan pola pikir tersebut berubah menjadi dapat melakukan semua sendiri daripada harus menunggu orang lain mengasihani kekurangan mereka.

Mahasiswa disabilitas yang berperilaku ini memang tidak menyimpang dengan kaidah atau norma sebagai identitas menjadi mahasiswa, mereka juga percaya birokrasi merupakan pemegang kendali kehidupan kampus, selain pola pikir untuk berkembang agar dapat mengabdikan sebagai seorang mahasiswa perlu ditekankan agar identitas tersebut tidak terlupakan. Pendampingan dari PSLD ataupun teman sejurusan menjadi hal penting dalam proses penyempurnaan identitas diri sebagai mahasiswa yang menjadi agen perubahan bagi dirinya, keluarga, lingkungan, bahkan masyarakat luas dengan kondisi mereka. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk bisa mengenalkan bahwa diri mereka yang spesial juga perlu sebuah pengakuan di kehidupan masyarakat nantinya, kampus sebagai

instansi Pendidikan yang menaungi atau mendidik mahasiswa disabilitas dapat mengemukakan kebijakan atau memberikan inovasi dalam metode pendidikan identitas diri dan penyampaian identitas kampus ramah disabilitas agar metode dalam mendidik kaum disabilitas dilakukan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat umum.

DISFUNGSI MANIFES DAN LATEN

Disfungsi manifes dan laten merupakan perbedaan pandangan terkait dengan pemaknaan disfungsi tersebut, dalam penelitian diatas sebenarnya terbagi sesuai dengan disfungsinya pernyataan dan kebijakan dengan undang – undang dan peraturan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan mahasiswa disabilitas. Manifes dalam penjelasannya merupakan pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau kelompok, sedangkan laten merupakan pernyataan yang dimaksudkan secara tersembunyi, terpendam, atau tidak terlihat tetapi memiliki maksud.

Keterkaitan disfungsi kebijakan dengan pandangan disfungsi manifes kemudian ditemukan tentang :

1. Pernyataan terkait dengan praktik layanan untuk semua yang berasas kesetaraan, pemenuhan hak, akomodatif, aksesibel dan tidak

diskriminatif menurut beberapa fakta dilapangan setelah pernyataan ini dikeluarkan sampai dengan sekarang beberapa mahasiswa disabilitas sedikit menyayangkan kesesuaian dilapangan dengan pernyataan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan belum sesuai, dalam beberapa kenyataannya diketahui tidak berfungsinya pernyataan tersebut atau terjadi disfungsi. Pernyataan ini termasuk dalam disfungsi manifes karena keterbukaan pemenuhan kebutuhan tersebut diketahui oleh semua orang atau dapat dirasakan semua orang

2. Kebijakan yang dikeluarkan oleh rektor terkait dengan ramah disabilitas pertama siap bimbing mahasiswa disabilitas sampai lulus dirasa kurang berjalan dengan baik, karena dalam kenyataan dilapangan ada beberapa poin penting dalam hal ini yang dirasakan kurang dan diberikan keterangan oleh mahasiswa disabilitas sendiri. Termasuk dalam disfungsi manifes karena bentuk kebijakan dapat dirasakan atau dilihat
3. Kebijakan rektor terkait dengan Infrastruktur untuk difabel siap 99 persen dirasakan sangat kurang,

pemenuhan infrastruktur sendiri belum baik secara keseluruhan, perbedaan wilayah kampus yang dibagi menjadi 2 juga menjadikan pemenuhan infrastruktur bagi mahasiswa disabilitas di kampus ketintang kurang daripada fasilitas di kampus lidah wetan, hal ini juga dirasakan mahasiswa disabilitas fakultas Teknik. Terjadinya disfungsi manifestasi dikategorikan bentuk disfungsi yang secara nyata dapat dilihat dan terlihat

Kemudian dalam pandangan disfungsi laten peneliti menemukan beberapa pernyataan dan kebijakan yang masuk dalam disfungsi laten karena pernyataan ini ada tetapi hasilnya tidak dapat dilihat secara langsung atau dirasakan secara langsung :

1. Pernyataan tentang ramah disabilitas dengan menunjang kebutuhan atau hak bagi mahasiswa disabilitas selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pimpinan yang afirmatif, pernyataan ini masih belum terlaksana oleh mahasiswa disabilitas kampus ketintang, karena mereka merasa kebijakan yang dikeluarkan lebih banyak menguntungkan kampus yang ada rektoratnya dengan kampus utama daripada fakultas Teknik

kampus ketintang. Mereka beranggapan kebijakan bagi kaum disabilitas yang dikeluarkan memang bertujuan untuk mahasiswa disabilitas tetapi perbedaan lokasi menjadi penghambat kebijakan tersebut bisa dirasakan oleh semua warga kampus

2. Pernyataan berkaitan dengan kampus ramah disabilitas tentang budaya lingkungan inklusif dan ramah untuk semua, pernyataan yang ditujukan kepada semua warga kampus. Budaya ramah disabilitas dengan tujuan menciptakan lingkungan ramah kaum disabilitas, tetapi dalam kenyataannya ramah disabilitas hanya dirasakan beberapa mahasiswa lainnya. Karena lingkungan kampus masih melihat mereka dengan tatapan yang kurang nyaman
3. Kebijakan masuk dalam disfungsi laten terkait dengan kebijakan rektor tentang mahasiswa difabel digabung dengan kelas reguler. Kenyataannya dengan kebijakan agar bertujuan mahasiswa reguler dapat mengenal dan berteman dengan mahasiswa disabilitas, tetapi minimnya edukasi cara komunikasi atau cara memperlakukan mahasiswa

disabilitas sehingga menyebabkan kebijakan ini belum berjalan dengan semestinya

KESIMPULAN

Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang dipenuhi secara umum dalam sektor publik, tentu akan mengalami perbedaan atau penanganan khusus dalam sektor Pendidikan. Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas berbeda setiap jenjang, hak penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan menjadi sorotan bagi semua orang apalagi jenjang perkuliahan. Sebagai mahasiswa yang istimewa dari mahasiswa lain, kampus tempat mahasiswa disabilitas menempuh jenjang perkuliahan akan di sorot sebagai kampus penerima mahasiswa disabilitas perguruan tinggi. Aksesibilitas kampus khusus mahasiswa disabilitas yang memadai akan mempermudah perkuliahan mahasiswa disabilitas sesuai kebutuhan mereka. Sebagai kampus yang menerima mahasiswa disabilitas unesa masih mengalami keterbatasan atau belum sesuai standar untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas yang ditentukan oleh pemerintah

Disfungsinya pernyataan serta kebijakan yang dikeluarkan memiliki disfungsi yang dibagi menjadi 2 antara disfungsi *manifes* dan disfungsi *laten* sesuai

dengan pemikiran Robert k. merton serta terbagai sesuai disfungsinya dengan rujukan undang – undang dan peraturan pemerintah untuk hak – hak bagi penyandang disabilitas dalam menempuh Pendidikan di perguruan tinggi. Disfungsi *manifes* atau dalam artian disfungsi yang diketahui secara terbuka berkaitan bentuk hasil yang bisa dilihat mata dan dirasakan secara fisik atau berbentuk, berkaitan dengan disfungsi *manifes* tentang pernyataan praktek layanan untuk semua yang berasas kesetaraan, pemenuhan hak, aksesibel dan tidak diskriminatif masih belum berjalan dengan semestinya.

Jenis disfungsi *laten* dalam pemikiran Robert k. Merton berkaitan dengan tidak terlaksana atau tidak berjalannya suatu pernyataan serta kebijakan yang dikeluarkan kampus unesa untuk ramah disabilitas, disfungsi *laten* memiliki makna atau arti tertutup, selain makna tertutup dalam pemaknaan *laten* membagi dalam kebijakan atau sesuatu hal yang tidak berbentuk, tidak terlihat, tetapi memiliki makna yang berfungsi sesemutinya. Dalam disfungsi *laten* dimaknai tentang disfungsi pernyataan atau kebijakan tidak terlihat tetapi diketahui sehingga mahasiswa disabilitas mengetahui pernyataan dan kebijakan mengalami disfungsi.

Untuk dapat meminimalisir disfungsi kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa disabilitas, peneliti kemudian memberikan beberapa masukan dan saran yang disampaikan sedikit oleh mahasiswa disabilitas dalam alur berfikir sebagai instansi Pendidikan yang terdidik berjalan semestinya dengan melakukan cara :

1. Memberikan edukasi kepada tenaga pendidik, tenaga kampus, sampai dengan mahasiswa reguler untuk menerima keberadaan mahasiswa disabilitas untuk membantu pendampingan saat

perkuliahan dan menciptakan lingkungan ramah disabilitas

2. Melakukan evaluasi tahunan, pemberian wadah aspirasi dan waktu untuk berdialog bersama mahasiswa disabilitas dengan birokrasi untuk memberikan kritik, masukan, sampai sanggahan sebagai kampus ramah disabilitas dalam berbagai aspek yang mendukung untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas
3. Birokrasi khusus mahasiswa disabilitas dalam keperluan kuliah untuk penyandang disabilitas



DAFTAR PUSTAKA

Aksesibilitas. 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aksesibilitas>.

Ginintasasi, Rahayu. 2012. “Kelompok Sosial.” : 12.
http://file.upi.edu/Direktori/Fip/Jur._Psikologi/195009011981032-Rahayu_Ginintasasi/Kelompok_Sosial.pdf.

Ismail Nurdin, Sri Hartati. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*.

Ningrum, Vinda maya setya. “Majalah Unesa.”
https://issuu.com/majalahunesa/docs/majalah_unesa_129.

Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. 2019. Media Sahabat Cendekia *Metodologi Penelitian Sosial*. ed. S.HI Lutfiah. Jatinogor.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. 2009. 2009 indonesia.

Rumateray, yune angel angelia. 2016. “Pemenuhan Hak - Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 6(2): 1689–99.
<http://doi.wiley.com/10.1002/ceas.12013%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/317087330%0Ahttps://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/39127%0Ahttps://cris.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/4755978/Julius+Ojebode%27s+Thesis.pdf%0Ausir.salford.a>

stella azasya. “UNESA Jamin Fasilitas Mahasiswa Difabel Sampai Lulus.”
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/stella/unesa-jamin-fasilitas-mahasiswa-difabel-sampai-lulus/3>.

Wahyudi, Ari. 2018. *Sosiologi Disabilitas Sosiologi Disabilitas*.

UNESA
Universitas Negeri Surabaya